

Analisis Manfaat Kegiatan Musrenbang terhadap Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Namorambe Deli Serdang

Faiz Berampu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: faizberampu@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out housing policies and residential areas, the legal framework for housing facilities, public institutions and services, the provision of housing facilities, public institutions and services such as laws and procedures for providing public housing, housing work, and work. The research method used is very good, while the source of information is the staff of the Deli Serdang Regency Housing and Development Office. The data analysis process is carried out by means of a data reduction process, presenting data and drawing conclusions, validating the data that has been collected and expressed in the form of a report. Research findings indicate factors that help and hinder, including communication skills between the parties responsible for implementing the plan, namely employees. In the field of public housing and maintenance work. Deli Serdang Regency and land owners, as well as employees have the right to resolve problems that arise in the process of handing over resources, equipment and public services (PSU) to the Deli Serdang Regency Government.*

Keywords: *public services, Deli Serdang Regency, employees*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman, kerangka hukum fasilitas perumahan, lembaga dan pelayanan publik, penyediaan fasilitas perumahan, lembaga dan pelayanan publik seperti undang-undang dan tata cara penyediaan perumahan rakyat, pekerjaan perumahan, dan bekerja. Metode penelitian yang digunakan sangat baik, sedangkan sumber informasinya adalah staf Dinas Perumahan dan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Proses analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, validasi data yang telah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan. Temuan penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membantu dan menghambat, termasuk kemampuan komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tersebut, yaitu karyawan. Di bidang perumahan umum dan pekerjaan pemeliharaan. Kabupaten Deli Serdang dan pemilik tanah, serta pegawai mempunyai hak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses penyerahan sumber daya, peralatan dan pelayanan publik (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: pelayanan publik, Kabupaten Deli Serdang, karyawan

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2).

Pengertian lain mengenai perumahan ialah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Ditambah penjelasan Kuswartojo (2010) dalam (Fadila, Yudhana, & Rini, 2017) bahwa perumahan formal merupakan berbagai rumah yang memiliki aturan pembangunan yang jelas dan bentuk/ pola teratur yang serempak tanpa ada pembedanya.

Received Desember 04, 2023; Accepted Desember 17, 2023; Published Februari 26, 2024

*Faiz Berampu, faizberampu@gmail.com

Produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu berupa layanan sipil, maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Menurut Moenir (2001:47), pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan dalam masyarakat. Napitupulu (2007:164) menerangkan bahwa : Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Perumahan tidak hanya sebuah bangunan fisik yang mmeberi naungan yang bertempat tinggal, namun juga dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan di dalam maupun di lingkungan nya. Menciptakan perumahan yang layak huni adalah salah satu tujuan dari Bidang Perumahan PERKIMTAN Deli Serdang. Bidang ini juga meninjau runah-rumah yang sudah tidak layak huni, jika terdapat rumah yang memang tidak layak untuk di tempati Bidang ini akan mencatat dan memberi bahan bangunan yang tujuan nya adalah untuk pemilik rumah bisa tinggal di rumah yang layak huni.

KAJIAN TEORI

Anderson dan Islamy (1994:20) mengemukakan unsur-unsur kebijakan publik, antara lain: 1. Kebijakan publik biasanya mempunyai tujuan atau perilaku atau etika tertentu pada pihak pejabat pemerintah; 2. Kebijakan publik melibatkan perilaku atau etika pejabat pemerintah; 3. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukan atau dikatakan akan dilakukan; 4. Baik dalam arti merupakan keputusan pejabat untuk bertindak; dan 5. Kebijakan pemerintah, dalam arti logis, didasarkan atau selalu didasarkan pada hukum yang bersifat memaksa (otoritas).

Easton (Abidin, 2004: 20) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai: penegakan (hukum) nilai-nilai seluruh anggota. Berdasarkan definisi tersebut, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang dapat bertindak secara sah terhadap masyarakat dan pilihan pemerintah untuk bertindak atau bertindak dipenuhi dalam bentuk kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Proses pengembangan kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahap yang dikelompokkan untuk memudahkan analisis kebijakan publik. Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan dinas bangunan khususnya yang dilaksanakan oleh dinas

bangunan, pertanahan, dan pertanahan kabupaten serta masalah pengalihan peralatan, sarana dan pelayanan (PSU) perumahan rakyat untuk menjamin berada di tangan dari yang tersedia. peralatan dan perbekalan. dan Badan Usaha Milik Negara (PSU) serta perumahan dan tempat tinggal sesuai dengan rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah serta situasi dan kebutuhan kota dan merupakan jaminan pemerintah daerah atas keberadaan sarana, perlengkapan dan fasilitas. (PSU).) sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kebijakan ini hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem air bersih dan pelayanan umum di bidang perumahan dengan memelihara dan mengelola prasarana, peralatan dan pelayanan umum (PSU) di lingkungan Wilayah Kabupaten Deli Serdang guna terciptanya tempat tinggal dan perumahan yang aman, sehat, aman, harmonis, tertib dan berkesinambungan.

PELAKSANAAN KERJA

Dalam melakukan kegiatan praktik kerja lapangan (magang) selama kurang lebih 1 bulan, penulis ditempatkan pada bidang perumahan. Kegiatan yang penulis lakukan pada bidang perumahan yakni survey rumah yang tidak layak huni, input data warga rumah tidak layak huni, melakukan penyerahan bahan bangunan kepada warga yang terdaftar rumah tidak layak huni dan membuat daftar laporan dokumentasi

Tidak hanya sebatas memberi bahan bangunan, bidang perumahan juga bertugas untuk membuat jalan aspal di perumahan – perumahan yang jalan nya belum di aspal. Salah satu contoh nya penulis melakukan survey perumahan yang jalan nya belum di aspal di daerah marendal.

Kegiatan praktik kerja lapangan (magang) ini dibimbing oleh Pembimbing perusahaan bapak Novi Armen, S.T. dan dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 16 Februari 2023. Kegiatan ini rutin dilakukan dari hari senin sampai jumaat, jam kerja mengikuti ketentuan yang telah berlaku di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang sifat nya membantu pada bidang perumahan.

INPUT DATA WARGA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Selama melakukan magang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, salah satu tugas penulis adalah menginput data warga yang mempunyai rumah tidak layak huni. Pekerjaan yang di serahkan ini juga di awasi oleh bapak pembimbing perusahaan Bapak Novi Armen, S.T. setelah input data penulis juga di ajak untuk melakukan survey ke lokasi yang telah di tentukan.

Tidak lupa penulis juga membantu di lapangan seperti dokumentasi dan lain- lain, biasanya untuk verifikasi data yang telah di input data nya ke web berkisar 1 minggu, jika di setuju bidang perumahan akan mengeluarkan bahan bangunan yang nantinya akan di serahkan kepada warga yang runah nya tidak layak huni.

METODE ANALISA

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan secara cermat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2013). Secara jelas hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. B. Reduksi data untuk mengumpulkan data yang disusun menjadi unsur-unsur dasar dan esensial. vs. Penyajian data merupakan hasil reduksi data yang disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan dan penyajian yang dapat berupa grafik, matriks atau bagian informasi. d) Pengambilan Keputusan Nerifikasi untuk mengetahui makna data yang dikumpulkan. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi secara sistematis menjadi cerita dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah. Langkah-langkah verifikasi data sebagai berikut:

- (1) membandingkan antara hasil studi dokumenter dengan hasil informasi dari hasil wawancara ataupun observasi.
- (2) mengidentifikasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian.
- (3) menarik simpulan serta saran-saran terhadap masalah yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Magang merupakan suatu program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya dengan kurikulum pendidikan.

Penulis melaksanakan kegiatan magang pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada Perumahan selama kurun waktu 1 bulan.

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti rapat bidang perumahan
2. Melakukan survey lokasi dan membantu survey teknis di lapangan seputaran Lubuk Pakam Kota
3. Melakukan dan membantu survey di perumahan Benna Garden
4. Melakukan dan membantu survey kompleks taman annaftris milala 1 Jln. Pelita, Kecamatan Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang
5. Survey lapangan warga yang termasuk kategori rumah tidak layak huni
6. Membantu menginput data warga kurang mampu, agar diberikan bahan merenovasi rumah
7. Membuat laporan berita acara
8. Membuat laporan dokumentasi hasil survey
9. Memberi bantuan kepada warga yang mempunyai rumah tidak layak huni sesuai data survey lapangan
10. Serah terima bahan di ikuti oleh kepala dusun
11. Mengikuti kegiatan Musrenbang bersama bapak Kepala Bidang Perumahan di Kecamatan Namorambe

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pendamping yang ada di bagian interior Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang antara lain Kepala Dinas PKPP, Kepala Bidang Pengelolaan Pertanahan Bidang Bangunan dan Pertanahan, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan BUMN dan Koordinator Perumahan Rakyat dan Bangunan Komersial, serta unsur eksternal Departemen PKPP antara lain staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Komunitas Remaja Eto Eto dari Dinas PUPR Deli. Kabupaten Serdang, sepertinya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyediaan Prasarana, Perumahan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Deli Serdang sudah diterapkan di banyak tempat. Pembangunan, prasarana dan pelayanan perumahan rakyat di Kabupaten Deli Serdang dalam program pelaksanaan PSU Perumahan dilaksanakan melalui dua program, yaitu:

1. Sarana, Peralatan dan Pelayanan Umum (PSU) Pengembangan program dan program pelaksanaan PSU Perumahan yang mencakup banyak subproyek, antara lain:
 - a. Jasa di bawah ini menyediakan sarana, perlengkapan dan fasilitas pada bangunan untuk menunjang pelayanan perumahan;

- b. Pengadaan dan koordinasi dalam penyediaan bahan bangunan, amenitas dan pelayanan umum dimana pekerjaannya adalah jasa Konsultan.

Badan akreditasi ikut serta dalam pelaksanaan strategi investasi perumahan PSU, termasuk pengaturan serah terima peralatan, sarana dan perlengkapan perumahan kepada pemerintah daerah, sehingga pengelolaan dan pengendalian PSU dan lingkungan perumahan dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi. pemerintah daerah. . Tim verifikasi melepaskan produk PSU yang diproduksi oleh Produsen di wilayah layanannya untuk mengatur pengiriman PSU perumahan Produsen. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (1999:80) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti melaksanakan dan mengendalikan arah tindakan kebijakan hingga tercapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan praktis, berbeda dengan pembuatan kebijakan yang merupakan proses formal. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah adanya arahan program yang mencakup upaya pengelolaan masukan. Implementasi merupakan tugas yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Suatu rencana harus dilaksanakan agar mempunyai efek atau tujuan yang diinginkan. Implementasi secara luas dipandang sebagai alat manajemen publik di mana para aktor, organisasi, sistem, proses dan sumber daya berkoordinasi bersama untuk menerapkan kebijakan guna mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Tim konsensus ikut serta dalam pelaksanaan pelaksanaan PSU dalam negeri. kebijakan, termasuk solusi transfer sumber daya. Bangunan dan pabrik diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemeliharaan dan pengelolaan PSU dan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tim persetujuan melepaskan produk PSU yang diproduksi oleh Pabrik di area layanannya untuk mengatur pengiriman PSU perumahan Pabrik. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (1999:80) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti melaksanakan dan mengendalikan arah tindakan kebijakan hingga tercapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan praktis, berbeda dengan pembuatan kebijakan yang merupakan proses formal. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah adanya arahan program yang mencakup upaya pengelolaan masukan. Implementasi merupakan tugas yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Suatu rencana harus dilaksanakan agar mempunyai efek atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan secara luas dipandang sebagai alat manajemen publik yang diperlukan oleh para aktor, organisasi, sistem, proses dan sumber daya untuk berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai suatu dampak atau tujuan.

Berdasarkan teori di atas, menurut peneliti undang-undang pengalihan PSU (Perbup Nomor 45 Tahun 2021) kurang efektif dalam hal komunikasi. Koordinasi antar aktor politik memang sudah tercapai, namun hubungan sosial dengan DOI: produsen perumahan atau masyarakat tempat tinggal terkait undang-undang yang dimaksud belum dilakukan. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya informasi yang diterima oleh para pengembang real estate mengenai peraturan pengalihan PSU, sehingga mereka merasa bahwa peraturan/skema tersebut merugikan mereka, sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat mencapai tujuan dan tujuan akhir dari PSU. kebijakan terkait PSU ini. Dari segi sumber daya, kebijakan ini sudah efektif. Peningkatan sumber daya manusia dalam organisasi meskipun jumlahnya tidak mencukupi serta adanya dukungan sumber daya dan anggaran dari APBD yang dipadukan dengan kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pelaksanaan transfer PSU di Pemerintahan Deli Serdang. Dari sisi tata kelola, implementasi kebijakan penyampaian PSU dalam negeri yang mencakup banyak teknologi terkait PSU sudah dimulai dimana setiap aktor politik dalam hal ini kelompok konsensus telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam negeri. .

Namun penerapan undang-undang pengalihan PSU di Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga menimbulkan kebingungan dan hambatan bagi pengembang dan warga kota dan bangunan tersebut. dimana ia terlibat dalam sistem transmisi PSU domestik. Hal ini tentunya sejalan dengan pandangan Edward III mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang tersebut. Sekalipun sumber daya untuk melaksanakan rencana tersebut cukup dan pihak yang melaksanakannya mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta mempunyai kemauan untuk melakukannya, implementasi rencana tersebut mungkin tidak efektif karena lemahnya sistem politik (Edward AKU AKU AKU). , 1980:11)

Menurut Pandi Afandi (2016:51) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperature, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Simanjuntak menjelaskan mengenai definisi lingkungan kerja di dalam bukunya yang berjudul "Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya" bahwa lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Sedarmayanti merupakan seorang penulis buku dan ia mengatakan bahwa dalam lingkungan kerja terdiri dari dua jenis. Pertama adalah lingkungan kerja fisik dan kedua adalah nonfisik. Menurutnya, lingkungan

kerja adalah keseluruhan atau segala sesuatu yang dilakukan oleh para pekerja dalam meningkatkan atau melemahkan hasil kerja yang dilakukan. Lingkungan kerja yang berkualitas akan menjadi pendorong bagi kegairahan kerja dan pada akhirnya akan mendorong produktivitas kerja (kinerja) karyawan, efisiensi, motivasi dan prestasi (Panjaitan 2017).

Menurut Pandi Afandi (2016:51) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperature, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seorang atau kelompok orang yang bekerja, yang berlandaskan etika dan prespektif kerja yang diyakini, dan diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret di dunia kerja. (Ginting, 2016; 7) dalam A Rahman (2019). Max Weber menyatakan intisari etos kerja orang Jerman adalah : rasional, disiplin tinggi, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat dan bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, menabung dan investasi. Novliadi, 2009) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja diantaranya yaitu faktor agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, struktur ekonomi, dan motivasi intrinsik individu. Menurut Tabrani Rusyan (2009:172) secara umum, etos kerja berfungsi sebagai: 1. Pendorong timbulnya perbuatan 2. Penggairah dalam aktivitas 3. Sebagai alat penggerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan praktek kerja (magang) bisa menjadi wadah yang bagus dan tepat untuk mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai lingkungan kerja sekaligus memberikan kesempatan mengimplementasikan teori akademisi dan praktek langsung di ruang lingkup kerja dengan beradaptasi dan menyesuaikan kebutuhan program studi yang telah dipelajari setiap mahasiswa. Selain itu dengan adanya praktek kerja (magang) mahasiswa bisa mengetahui dan mendapatkan pembelajaran dari banyaknya hal baru yang tidak bisa didapatkan pada masa perkuliahan seperti ruang lingkup kerja, budaya perkerjaan, disiplin kerja, komunikasi antar sesama karyawan dan juga atasan serta banyak orang dan keterampilan seperti mengelola data.

Berdasarkan apa yang telah penulis laksanakan dan amati di bidang perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan penulis mempunyai bebrapa usulan yang disarankan bagi kebaikan segala pihak yang terkait denga praktik kerja lapangan ini, yakni: 1. Para mahasiswa diberikan tugas sesuai dengan program keahlian yang dimilikinya,

biarpun berbeda tapi masih ada kaitanya dengan jurusan. 2. Kedisiplinan dan etos kerja karyawan yang harus diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- HARDI, HAFIT. PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG. Diss. PERPUSTAKAAN, 2017.
- Daulay, Afrahul Fadhila. "DASAR-DASAR MANAGEMEN ORGANISASI." Al- Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2019: 34-48.
- Fahmi, and Ratna Widyawati. "Analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 –2037." Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung, 2020: 40-53.
- Suryani, Dian April Yani, Boy Ridho Hamgara, Raja Rendi Alfayed, and Juliana Nasution. "PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA MABAR KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG." Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna, 2022: 401-412.